



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN MELALUI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  
Nomor: 2096 K/Pdt/2013)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh:**

**Taritis Tri Nilasari**

**NPM. 231003741020690**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2025**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN MELALUI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  
Nomor: 2096 K/Pdt/2013)**

**TESIS**

**Disusun  
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**


**Pembimbing,**

  
**Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum**  
**NUPTK. 4534740641230083**

**Peneliti,**

  
**Taritis Tri Nilasari**  
**NPM. 231003741020690**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

  
**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.**  
**NUPTK. 3241741642230113**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2025**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN MELALUI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  
Nomor: 2096 K/Pdt/2013)**

**TESIS**

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal 02-09-2025  
dan disahkan pada tanggal: ..19-09-2025**

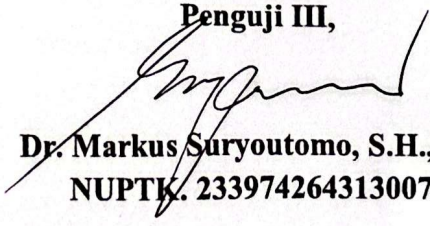
**Penguji I,**

  
**Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H.,M.Hum  
NUPTK. 4534740641230083**

**Penguji II,**

  
**Dr. Siti Mariyam, S.H.,M.H.  
NUPTK. 9856744645230062**

**Penguji III,**

  
**Dr. Markus Suryoutomo, S.H.,M.Si  
NUPTK. 2339742643130073**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

  
**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.  
NUPTK. 3241741642230113**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang:

Nama : Taritis Tri Nilasari, S.H.

NPM : 231003741020690

Alamat : Jl. Jangli Tlawah IV No. 75, Jatingaleh, Candisari, Semarang.

Dengan ini menyatakan:

1. Tesis saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Tesis saya tidak ada sedikitpun plagiat dari karya ilmiah orang lain;
3. Tesis saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 19-09-2025

Yang menyatakan,



**Taritis Tri Nilasari, S.H.**

**NPM. 231003741020690**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunianya, Penulis dapat menyelesaikan tesis yang dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA”**.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat doa, bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.** selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. **Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. **Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.** selaku Kepala Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu sabar, pengertian, dan selalu memberikan saran serta masukan dengan penuh kasih sayang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. **Dr. Suroto, S.H., M.Hum.** selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
5. **Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum.** selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

6. **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Penulis.
7. Orangtua Penulis Bapak **Joko Tri Laksono** dan Almarhumah Ibu **Hartini** yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan.
8. Suami Penulis **Supriyadi** yang selalu memberikan dukungan dalam menjalankan studi dan Kedua anak-anak Penulis **Adnan Qila Arzaki Pratama** dan **Zahwa Aqila Putri** atas pengertiannya selama Penulis mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan dan Kolega Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 angkatan XXIII yang bersama-sama melewati suka dan duka selama masa studi berlangsung;
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan penulisan tesis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, .....



**Taritis Tri Nilasari, S.H**  
NPM. 231003741020690

## ABSTRAK

Direksi dapat diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selama prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan aturan dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Dalam prakteknya, masih banyak ditemukan adanya pemberhentian Direksi perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yakni tidak adanya kesempatan bagi Direktur untuk membela diri. Peneliti dalam tesis ini ingin menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap Direksi yang diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan bagaimana akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan dilakukan secara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan melihat kesesuaian antara peraturan yang berlaku, yaitu UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan realita yang terjadi dalam prakteknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemberhentian Direksi perseroan melalui RUPSLB dilindungi oleh UUPT Nomor 40 Tahun 2007, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

**Kata kunci:** *Perlindungan hukum, Pemberhentian Direksi, RUPS*

## **ABSTRACT**

*Directors can be dismissed through a General Meeting of Shareholders, provided the procedures for the General Meeting are in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. In practice, many dismissals of company directors through a General Meeting of Shareholders are found to be inconsistent with these provisions, namely, the lack of an opportunity for directors to defend themselves. This thesis aims to analyze the legal protection provided for the dismissal of company directors through a General Meeting of Shareholders. The research method used is normative juridical and is conducted through a literature review. This study examines the alignment between applicable regulations, namely Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and the reality of the situation in practice. The data used in this study are secondary data obtained from laws and regulations, court decisions, and legal literature. The results indicate that legal protection for the dismissal of company directors through a General Meeting of Shareholders is protected by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, thus providing legal certainty for the parties involved.*

**Keywords:** *Legal Protection, Dismissal of Directors, General Meeting of Shareholders*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>7</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>8</b>
<b>E. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>8</b>
1. Metode Pendekatan .....	8
2. Spesifikasi Penelitian .....	9
3. Sumber dan Jenis Data Penelitian .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Teknik Analisis Data .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS.....</b>	<b>11</b>
1. Definisi Perseroan Terbatas .....	11
2. Pendirian Perseroan Terbatas .....	15
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	19
<b>B. TINJAUAN KHUSUS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....</b>	<b>23</b>
I. Pengertian dan Konsep Rapat Umum Pemegang Saham .....	23
1. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.....	23
2. Tempat Rapat Umum Pemegang Saham Diadakan .....	25
3. Bentuk dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham .....	27

II. Pengertian dan Konsep Direksi Perseroan.....	32
1. Pengangkatan Direksi Perseroan.....	32
2. Kewajiban dan Tanggun Jawab Direksi .....	34
3. Pemberhentian Anggota Direksi .....	37
4. Pemberhentian Anggota Direksi Oleh Pemegang Saham Melalui RapatUmum Pemegang Saham.....	40
5. Pengunduran Diri Anggota Direksi.....	42
III. Pengertian dan Konsep Dewan Komisaris PerseroanAgama.....	43
1. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan .....	43
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengawasan Dewan Komisaris. ....	45
3. Kewenangan Dewan Komisaris. ....	50
4. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris.....	51
<b>C. TINJAUAN KHUSUS PERLINDUNGAN HUKUM.....</b>	<b>53</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	53
2. Tujuan dan Prinsip Perlindungan Hukum .....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
1. Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Perseroan Yang Diberhentikan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.....	56
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2096 K/Pdt/2013 .....	76
3. Akibat Hukum Direksi Perseroan Yang Diberhentikan Melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2096 K/Pdt/2013 .....	94
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
1. Kesimpulan.....	98
2. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>